ANALISIS FINANCIAL DISTRESS PADA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014-2018

Mutiara Pangku¹, Lukfiah Irwan Radjak²

1,2, Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Email: mutiarapangku@gmail.com, lukfiahradjak@umgo.ac.id

Info Artikel: Diterima: 13 Nov. 2019, Disetujui: 17 Februari 2020, Publish 15 Juli 2021

Abstract:

This research was conducted at the Regional Financial and Asset Agency of Gorontalo Province. The purpose of this study is to obtain answers to problems that have been formulated, to analyze financial risks to the government of Gorontalo Province. This study uses binary logistic regression method where the dependent variable financial distress is dummy and only has two possible outcomes, yes and no. From the results of research conducted partially on the independent variables, namely regional financial independence, local revenue, regional expenditure and solvency have no positive effect on the dependent variable financial distress. Meanwhile, simultaneously the independent variables of financial independence, local revenue, regional expenditure and solvency have a positive effect on the variables tied to financial distress.

Keywords: *Financial Independence, PAD, Solvency, Regional Expenditure .*

Abstrak:

Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan yakni, untuk menganalisis risiko *financial distress* pada pemerintah Provinsi Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode regresi logistik biner dimana variabel terikat *financial distress* bersifat dummy dan hanya memiliki dua kemungkinan hasil yakni ya dan tidak. Dari hasil penelitian yang dilakukan secara parsial terhadap variabel bebas yakni kemandirian keuangan daerah, pendapatan asli daerah, belanja daerah dan solvabilitas tidak berpengaruh positif terhadap variabel terikat *financial distress*. Sedangkan secara simultan variabel bebas kemandirian keuangan, pendapatan asli daerah, belanja daerah dan solvabilitas berpengaruh positif terhadap variabel terikat yaitu *financial distress*.

Kata kunci : Kemandirian Keuangan, PAD, Solvabilitas, Belanja Daerah

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini menyelenggarakan pemerintah Negara dan Pembangunan secara Nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD)

Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan maka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi, provinsi dibagi atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah mempunyai hak mengatur dan

mengurus rumah tangganya sendiri sebagaimana ini disebut dengan otonomi daerah, hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat secara langsung.

APBD adalah rancangan keuangan tahunan daerah yang dibuat agar dapat menampung berbagai macam kepentingan publik melalui program pemerintah daerah yang tentunya dapat bermanfaat bagi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.5 Tahun 2005 pasal 26 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Namun, jika melihat kenyataan saat ini banyak daerah otonom yang masih belum mampu mengelolah keuangan daerah mereka sendiri, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra 2012) sebagai lembaga independen yang ikut megawasi pelaksanaan otonomi daerah mengemukakan bahwa kini kondisi keuangan daerah cenderung kritis dan mengkhawatirkan, ini disimpulkan dari hasil penelitian fitra 2012 tentang Prediksi *Financial distress* Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia terdapat 291 pemerintah daerah di Indonesia yang 60% lebih APBD-nya untuk belanja pegawai. Fitra juga menyatakan bahwa jika kondisi ini dibiarkan secara terus menerus maka kebangkrutan daerah akan menjadi ancaman 2-3 tahun mendatang. Selain itu kondisi ini diperkuat dengan ringkasan APBD yang

diterbitkan oleh Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) tentang Belanja Daerah APBD tahun 2018 menerangkan bahwa Pada tahun anggaran 2018, total belanja APBD adalah sebesar 1.153,9 triliun rupiah dengan komposisi rasio belanja terbesar secara berurutan adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja lainnya, dan belanja modal.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015- 2019, bahwa porsi belanja modal yang ditetapkan adalah sebesar 30%. Bagi pemerintah daerah yang tidak mampu mencapai tingkat belanja modal tersebut dapat dinyatakan dalam status *financial distress* pemerintahan atau ketidakmampuan pemerintah dalam daerah menyediakan pelayanan publik sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan (Jones dan Walker, 2007), karena seharusnya belanja modal dapat dioptimalkan guna menyediakan pelayanan publik yang maksimal. Dibandingkan belanja modal, banyak daerah di Indonesia yang menghabiskan anggarannya untuk belanja pegawai bahkan bisa mencapai 70% dari total belanja daerah, jika daerah melewati jumlah ini secara terus menerus maka daerah kemungkinan akan mengalami kondisi *financial distress*. Dari data ringkasan yang diterbitkan oleh DPJK tahun 2018 diatas provinsi Gorontalo merupakan wilayah dengan rasio belanja pegawai terbesar ke-3 di Indonesia. hal ini tentu perlu dikhawatirkan oleh pemerintah daerah mengingat jika penggunaan belanja pegawai terus mengalami kenaikan hingga menghilangkan rasionalitas APBD maka daerah bisa mengalami kebangkrutan dan yang dirugikan adalah masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan,

untuk menganalisis risiko *financial distress* pada pemerintah Provinsi Gorontalo. Berdasarkan observasi awal bahwa Terjadinya otonomi daerah yakni penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga menyebabkan risiko terjadinya *financial distress* dan Penyerapan anggaran belanja pegawai pemerintah provinsi Gorontalo mengalami kenaikan pada tahun 2017 ke 2018.

Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Memprediksi mengenai potensi kebangkrutan sangat penting sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah yang selama ini terjadi. Sehingga dapat diambil suatu kebijakan untuk memperbaiki kondisi dan kinerjanya. Dengan adanya tindakan untuk memprediksi potensi kebangkrutan sangat mungkin dimiliki oleh setiap pemerintah daerah agar dapat dihindarkan atau paling tidak mengurangi risiko kebangkrutan tersebut. Indikasi kebangkrutan suatu daerah dapat dilihat melalui informasi yang terdapat dalam laporan keuangannya.

Analisa laporan keuangan dapat dijadikan dasar untuk mengukur tingkat kesehatan suatu pemerintah daerah. Hal ini dapat mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugas atau roda pemerintahan, keefektifan penggunaan aktivitya, hasil usaha pendapatan yang telah dicapai, beban-beban tetap yang harus dibayar serta potensi kebangkrutan yang mungkin akan dialami.

Financial distress merupakan ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan dana (kesulitan keuangan)

yang berakibat ketidakmampuan pemerintah untuk memberi pelayanan pada publik sesuai standar minimal mutu pelayanan yang telah ditetapkan (Jones dan Walker, 2007). Terkait kesulitan keuangan pemerintah daerah, Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah menetapkan persyaratan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman daerah guna mengatasi kesulitan keuangan tersebut yaitu nilai debt service coverage ratio minimal 2,5. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rasio kemandirian keuangan, pendapatan asli daerah, rasio hutang, dan realisasi belanja terhadap *financial distress* pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo. Jones dan Walker (2007) menggunakan financial variable dalam penelitian local government distress di Australia, salah satu rasio dalam financial variable tersebut adalah rasio kinerja pemerintah berupa Return On Asset (ROA) dan net income (surplus) by annual interest payment (Nicover) yang berpengaruh terhadap government local distress.

Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini menggunakan rasio performance government wealth (Plammer et al. 2007) dan ROA (Cohen, 2006) yang menggunakan jumlah surplus atau defisit atas realisasi atas APBD. Jika pemerintah daerah mempunyai jumlah surplus yang tinggi, maka pemerintah daerah tersebut mempunyai angka rasio kinerja keuangan yang tinggi. dan mempunyai probabilitas yang besar untuk mengalami *financial distress* sehingga tidak mampu menyediakan

pelayanan pada publik sesuai dengan standar minimal mutu pelayanan yang telah ditetapkan. Adapun desain dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka Berfikir

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kuantitatif. Berkaitan dengan pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) yaitu mengumpulkan data dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang relevan dengan penelitian ini. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Kemandirian Keuangan terhadap kondisi *Financial distress*

Dari hasil pengujian secara parsial yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa kemandirian keuangan tidak berpengaruh positif terhadap kondisi *financial distress*. Hal ini sejalan dengan peneliti dari Dewi Sartika tahun 2016 tentang analisis prediksi *financial distress* pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia dengan hasil "kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kondisi *financial distress*". Selain itu, peneliti juga melakukan uji koefisien secara parsial untuk melihat seberapa besar pengaruh kemandirian keuangan dapat menggambarkan *financial distress*. Dari hasil pengujian tersebut, kemandirian keuangan bisa menggambarkan *financial distress*

hanya sebesar 1,60 %. Pada dasarnya, kemandirian keuangan atau otonomi fiskal ini mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah (Halim dalam Pramono, 2014). Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber pendapatan eksternal, semakin tinggi rasio kemandirian keuangan ini berarti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah yang berarti baik bagi pemerintah daerah ataupun pemerintah daerah bisa saja mengalami kondisi sebaliknya. Rasio ini digunakan untuk menggambarkan seberapa besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Dari hasil olah data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan bantuan Excel, data kemandirian keuangan menunjukkan hasil fluktuasi artinya setiap tahun dari tahun 2014-2018 tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo cenderung tidak stabil. Range kemandirian keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo berdasarkan data berada di antara 25

% - 35 % dan angka ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Gorontalo dalam tingkat kemandirian berada pada pola konsultatif artinya campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang serta lebih banyak memberikan konsultasi.

B. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kondisi *Financial distress*

Dari hasil pengujian secara parsial yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Peneliti juga melakukan pengujian koefisien secara parsial pendapatan asli

daerah mampu menggambarkan *financial distress* sebesar 1,67% . Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Sari 2018 dalam jurnal “pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kondisi *financial distress* pada pemerintah daerah kabupaten dan kota se- Indonesia” yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap kondisi *financial distress* ini dikarenakan bahwa PAD yang dihasilkan suatu daerah menunjukkan adanya peningkatan pada kemampuan dan kebijakan yang bisa dilakukan oleh daerah dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Artinya pendapatan asli daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap *financial distress* pemerintahan.

Rasio pendapatan asli daerah ini atau biasa disebut dengan growth ratio yang dapat mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari tahun ke tahun, dengan mengetahui pertumbuhan untuk masing-masing sumber pendapatan asli daerah maka komponen pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah mana yang perlu dan layak untuk mendapat perhatian lebih oleh pemerintah pusat.

Data laporan keuangan yang diolah oleh peneliti juga menunjukkan adanya peningkatan pendapatan asli daerah terhadap pendapatan asli daerah yang terjadi pada tahun 2014- 2018. Pengaruh Solvabilitas terhadap kondisi *Financial distress*

Dari hasil olah data secara parsial yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa solvabilitas berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Hasil negatif ini karena solvabilitas digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah dalam melunasi hutang. Hutang

pemerintah daerah adalah bagian yang penting dalam pendanaan karena dapat dipergunakan sebagai penopang pemerintah dalam hal pembiayaan pembangunan daerah apabila pendapatan asli daerah dan dana transfer dari pemerintah pusat tidak mencukupi kebutuhan pemerintah daerah. Pada Peraturan Pemerintah No.54 tahun 2005 tentang pinjaman daerah menyatakan bahwa pinjaman pemerintah daerah mampu dilakukan oleh pemerintah pusat, dengan adanya pinjaman daerah maka pemerintah daerah dapat melanjutkan untuk melakukan pembangunan daerah. Namun berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa solvabilitas dapat menggambarkan *financial distress* sebesar 4,42% .

Menurut (Pasaribu, 2012) yang menyatakan bahwa salah satu prediktor utama *financial distress* adalah hutang. Kebangkrutan biasanya diawali dengan terjadinya moment gagal bayar sehingga semakin besar jumlah hutang maka semakin tinggi probabilitas *financial distress*. Ini tidak hanya terjadi pada perusahaan yang mengutamakan laba saja atau perusahaan swasta, beberapa penelitian sebelumnya membuktikan bahwa total kewajiban terhadap total asset dan total kewajiban jangka pendek terhadap pendapatan dapat dijadikan sebagai indikator sebuah model penelitian untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan.

C. Pengaruh Belanja Daerah terhadap kondisi Financial distress

Dari hasil olah data secara parsial yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Peneliti juga melakukan uji koefisien determinasi parsial terhadap belanja daerah dengan hasil yang menunjukkan bahwa dari ke 4

variabel bebas yang digunakan belanja daerah mampu menggambarkan *financial distress* yang paling besar diantara variabel bebas lainnya. Dalam Peraturan Pemerintah RI No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah sangat berkaitan dengan anggaran daerah karena belanja daerah merupakan bagian dari anggaran daerah, hal ini disebabkan adanya keterbatasan sumber daya yang ada, maka diperlukan alokasi yang sesuai dengan prioritas dan penentuan kurun waktu atas alokasi tersebut. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan undang-undang.

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (Alifah, 2009), belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

D. Pengaruh kemandirian keuangan, pendapatan asli daerah, solvabilitas dan belanja daerah terhadap *financial distress*.

Dari hasil pengujian secara simultan yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa kemandirian keuangan, pendapatan asli daerah, solvabilitas, dan belanja daerah bersama-sama berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Dari hasil uji koefisien determinasi secara simultan menunjukkan bahwa kemandirian keuangan, pendapatan asli daerah, solvabilitas, dan belanja daerah

mampu menggambarkan *financial distress* sebesar 47,8%.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan hasil kesimpulan maka peneliti memberikan saran sebagai berikut Untuk pemerintah :

1. Pemerintah daerah Provinsi Gorontalo sebaiknya lebih bisa mengatur pengalokasian antara belanja daerah, dimana belanja modal sebagai salah satu alat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah dan meminimalisir alokasi untuk belanja pegawai. Dalam melakukan pengeluaran daerah, tidak semata-mata pengalokasian anggaran untuk belanja modal secara langsung, melainkan dapat mempertimbangkan pengeluaran untuk intensifikasi dan eksistensi dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah.
 2. Pemerintah Provinsi Gorontalo agar dapat berupaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah, karena ini akan memberikan dampak pada peningkatan alokasi belanja modal yang merupakan cerminan pembangunan daerah.
 3. Pemerintah Provinsi Gorontalo juga dapat menggali potensi-potensi daerah yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, untuk dapat menciptakan keuangan daerah yang mandiri sesuai dengan tujuan otonomi daerah.
 4. Dalam penyusunan APBD pemerintah Provinsi Gorontalo dapat memperhatikan pengalokasian belanja modal dari tahun ke tahun terutama belanja modal yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
- Untuk peneliti selanjutnya :

REFERENSI

- Erlina, dkk. 2015. Akuntansi Keuangan daerah Berbasis Akrua Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Darise, Nurlan. 2008, Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : PT.Indeks.
- Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Pertama, Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: CV. Alvabeta.
- Albasiah, O. A. 2013. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011).
- Atmaja, Khoirul Fariz. 2012. Analisis Rasio Keuangan untuk Memprediksi Kemungkinan Financial Distress. Accounting Journal. ISSN 2252-6765.
- Lukfiah, Machmud. 2018. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo
- Pasaribu, Rowland Bismark Fernando. 2008. Penggunaan Binary Logit untuk Prediksi Financial Distress Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta (Studi Kasus Emiten Industri Perdagangan). Jurnal Ekonomi Bisnis & Akuntansi Ventura. Vol. 11, wwwNo. 2
- Sartika, Dewi. 2016 . Analisis Financial Distress Pada Pemerintah